

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Kegiatan ekonomi di masyarakat tidak akan terlepas dari ketergantungan terhadap peran lembaga perbankan. Karena peran dan perantara lembaga perbankan memungkinkan semua kegiatan ekonomi di masyarakat berjalan dengan lancar. Sebagai salah satu subsistem dari industri perbankan, industri perbankan berperan sebagai penggerak utama perekonomian suatu negara. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri perbankan terdiri dari bank dan institusi keuangan non bank. Kinerja bank sangat penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara karena kegiatan ekonomi masyarakat modern membutuhkan jasa bank untuk memfasilitasi transaksi keuangan seperti jasa pembayaran, penyimpanan uang, peminjaman uang, perpanjangan kredit, penukaran mata uang, dan layanan lainnya. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, kegiatan perbankan meliputi tiga tugas yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa-jasa perbankan lainnya. Dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat dalam berbagai macam bentuk simpanan, selanjutnya dana yang telah dihimpun oleh bank akan disalurkan dalam bentuk pemberian kredit kepada sektor-sektor usaha dan pihak-pihak lain yang membutuhkan dana.

Dunia usaha yang berada di daerah pedesaan seperti petani, peternak, nelayan, pedagang, pengrajin, dan usaha kecil lainnya, biasanya membutuhkan kredit dalam jumlah yang bervariasi. Kebutuhan masyarakat yang mendesak sering kali menimbulkan masalah dalam penyediaan dana. Masyarakat memerlukan uluran tangan dalam memenuhi kebutuhan keuangan untuk dapat mengembangkan usahanya. Untuk itu diperlukan sebuah bank yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan proses pengajuan kredit yang relatif sederhana dan tidak berbelit-belit. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menyadari peran yang cukup strategis dalam perekonomian Indonesia, khususnya UMKM.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan perbankan yang menghimpun dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Mayoritas penyaluran kredit ke BPR ditujukan kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau masyarakat kelas menengah ke bawah sebab, BPR mampu memberikan layanan prosedur yang lebih sederhana dan lokasinya yang memudahkan akses masyarakat kecil, serta lebih mengutamakan hubungan baik kepada nasabah dengan cara pendekatan interaksi personal dan melakukan penyesuaian prosedur dalam memberikan pinjaman. Berdasarkan Data Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK jumlah BPR mencapai 1.402 bank hingga Desember 2023. Pada saat ini, provinsi Bali memiliki 135 unit BPR, dengan 8 di antaranya masih beroperasi di Kabupaten Buleleng.

Sejak akhir 2019, pandemi *Covid-19* berdampak besar pada banyak hal, terutama ekonomi. Hal ini menyebabkan ketidakpastian yang tinggi, yang mengakibatkan penurunan drastis dalam aktivitas ekonomi, termasuk penyaluran kredit perbankan di

Indonesia. Salah satu yang paling signifikan adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang berkontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi masyarakat kecil dan menengah, terutama di wilayah. Selama pandemi, banyak debitur mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban kredit mereka, yang menyebabkan risiko kredit bermasalah meningkat di banyak BPR. Pasca *Covid-19* adalah fase baru di mana masyarakat di seluruh dunia memasuki setelah pandemi dinyatakan berakhir. Pada saat ini, BPR menghadapi tantangan untuk mengembalikan kinerja penyaluran kredit sambil mempertahankan kualitas aset yang baik. Dengan kondisi ekonomi yang mulai membaik, BPR dapat kembali meningkatkan aktivitas pembiayaan mereka, tetapi hal tersebut harus dilakukan dengan lebih hati-hati. BPR harus mengubah metode penyaluran kredit, memperketat analisis risiko, dan mempertimbangkan sektor usaha yang memiliki prospek yang lebih baik setelah pandemi.

Berdasarkan lampiran 01. menunjukkan jumlah kredit yang diberikan kepada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng dari tahun 2022 hingga 2024. Data yang dikumpulkan dari BPR di Kabupaten Buleleng menunjukkan bahwa adanya dinamika fluktuasi dalam jumlah penyaluran kredit yang diberikan. Beberapa BPR mengalami penurunan penyaluran kredit pada awal pemulihan yang disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dan kehati-hatian masyarakat untuk berutang. Namun, pemulihan pada akhir tahun menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi mulai membaik, mendorong permintaan pembiayaan baru peningkatan dalam volume kredit yang disalurkan.

Sebagai salah satu kegiatan utama bank dan penghasil pendapatan bank, penyaluran kredit ini sifatnya begitu penting sehingga ketika penyaluran kredit

menurun, akan dapat mempengaruhi kinerja bank secara keseluruhan. BPR menghadapi tantangan untuk mempertahankan pertumbuhan kredit di tengah risiko kredit bermasalah yang masih tinggi. Oleh karena itu, strategi BPR dalam penyaluran kredit pasca *Covid-19* menjadi sangat penting, termasuk memperketat seleksi calon debitur dan mengutamakan sektor bisnis yang bertahan atau tumbuh selama pandemi. Pemberian kredit dianggap sebagai kegiatan perbankan yang paling penting karena ini adalah cara untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilakukan dengan pertimbangan yang matang terhadap risiko yang mungkin timbul. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana BPR mengelola strategi penyaluran kredit pada masa pemulihan, baik melalui penyesuaian kebijakan kredit, seleksi sektor usaha prioritas, maupun penguatan manajemen risiko. Analisis terhadap pola pertumbuhan kredit pasca *Covid-19* di BPR menjadi landasan penting untuk mengevaluasi efektivitas strategi pemulihan ekonomi skala mikro di daerah. Jumlah NPL yang tinggi adalah salah satu faktor yang menyebabkan kesulitan penyaluran kredit. Selain itu, perbankan harus membuat cadangan penghapusan yang lebih besar, yang berarti mereka kehilangan lebih banyak dana (Meydianawhati, 2007).

Bank menyalurkan dana masyarakat yang sedang membutuhkan melalui pemberian kredit. Pihak bank harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit agar mereka dapat meningkatkan penyaluran kredit. Jika ada peningkatan atau penurunan dalam penyaluran kredit, hal tersebut pasti dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Retnadi (2006) kemampuan penyaluran kredit perbankan dipengaruhi oleh berbagai hal yang dapat ditinjau dari sisi internal maupun eksternal bank. Dari sisi internal, penyaluran kredit dapat dipengaruhi

oleh kemampuan bank dalam menghimpun dana dari masyarakat dan juga dari kinerja keuangan perbankan itu sendiri yang dapat dilihat dari rasio-rasio keuangan perbankan. Selain itu, dari sisi eksternal perbankan dapat dipengaruhi oleh kondisi perekonomian Indonesia, peraturan pemerintah, suku bunga, inflasi dan lain-lain.

Pada dunia perbankan, *Non Performing Loan* merupakan risiko kredit yang paling mendasar, kegagalan bank dalam mengelola risiko ini dapat menimbulkan risiko bagi bank lainnya. Tingkat NPL yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat risiko penyaluran kredit yang akan terjadi di bank juga cukup tinggi. Jumlah kredit yang diberikan kepada masyarakat dapat berkurang karena tingkat utang *non-performing* yang tinggi. Suku bunga berubah setiap saat, berdampak pada pendapatan bunga yang terjadi di perusahaan. Nasabah lebih suka suku bunga tinggi daripada suku bunga rendah karena penurunan pendapatan bunga pinjaman. Untuk menghindari kredit macet tinggi, kredit yang diberikan dikurangi dari sebelumnya, yang mengakibatkan pelanggan melakukan pembayaran yang tidak tepat waktu.

Dana yang memadai diperlukan agar operasi dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang paling besar. Bank memiliki tiga sumber dana untuk memenuhi keuntungan tersebut. Bank mendapatkan sebagian besar dananya dari Dana Pihak Ketiga. Sumber dana ini sangat penting untuk keberhasilan bank karena mereka dapat membayar operasi mereka (Kasmir, 2014). Kepercayaan masyarakat sangat penting bagi operasi bank. DPK menjadi komponen terpenting dalam menghasilkan suatu laba bank. Semakin tinggi dana pihak ketiga, maka bank akan memiliki banyak dana yang dapat disalurkan kepada masyarakat. Dari hal tersebut, dapat disimpulkan

bahwa besar kecilnya tingkat penyaluran kredit ditentukan oleh faktor dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun oleh bank.

Sebagaimana ditunjukkan dalam lampiran 02. perkembangan DPK pada 8 BPR di Kabupaten Buleleng dari tahun 2022-2024, terdapat hal yang tidak biasa terjadi pada BPR Nur Abadi tahun 2023 triwulan I terjadi peningkatan sebesar 1.4%, tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 2.99%. Hal yang sama terjadi pada triwulan III nilai DPK mengalami peningkatan sebesar 2.7% akan tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 1.33%. Pada BPR Bank Buleleng 45 (perseroda) tahun 2022 triwulan III terjadi peningkatan sebesar 7.74%, tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 1.28%. Hal yang sama terjadi di tahun 2024 triwulan III terjadi peningkatan sebesar 5.11%, namun penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 2.89%. Pada BPR Indra Candra tahun 2024 triwulan I nilai DPK meningkat sebesar 2.33% tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 6.42%. Di tahun yang sama pada triwulan III nilai DPK meningkat sebesar 2.24, tetapi penyaluran kredit menurun sebesar 4.43%. Pada BPR Nusamba Kubutambahan tahun 2022 triwulan IV nilai DPK meningkat sebesar 3.32%, tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 0.05%. Di tahun 2023 triwulan IV nilai DPK meningkat sebesar 9.65%, namun penyaluran kredit menurun sebesar 0.26%. Di tahun 2024 triwulan I nilai DPK meningkat sebesar 4.84%, tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 2.48%. Di tahun yang sama pada triwulan III nilai DPK meningkat sebesar 2.89, namun penyaluran kredit menurun sebesar 6.00%. BPR Adi Jaya Mulia nilai DPK meningkat sebesar 7.53% di tahun 2024 triwulan II, tetapi penyaluran kredit menurun sebesar 3.57%. pada triwulan III nilai DPK meningkat sebesar 2.28%, tetapi penyaluran kredit

menurun sebesar 5.42%. pada triwulan IV nilai DPK meningkat sebesar 3.49%, tetapi penyaluran kredit menurun sebesar 2.31%. BPR Cahaya Bina Putra nilai DPK di tahun 2022 triwulan II mengalami peningkatan sebesar 2.84%, akan tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 2.57%. Di triwulan ke III nilai DPK meningkat sebesar 5.29%, namun penyaluran kredit menurun sebesar 4.27%. Di tahun 2023 triwulan IV nilai DPK meningkat sebesar 8.40%, tetapi penyaluran kredit menurun sebesar 5.01%. Pada BPR Suryajaya Kubutambahan nilai DPK di tahun 2022 triwulan II mengalami peningkatan sebesar 5.02%, akan tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 1.15%. Di tahun 2023 triwulan III terjadi hal yang serupa nilai DPK meningkat sebesar 6.62%, namun penyaluran kredit menurun sebesar 8.85%. Di tahun 2024 triwulan II nilai DPK meningkat sebesar 2.89%, namun penyaluran kredit menurun sebesar 7.21%. Pada BPR Kanaya nilai DPK di tahun 2023 triwulan IV terjadi peningkatan sebesar 0.11%, tetapi penyaluran kredit mengalami penurunan sebesar 4.57%. Di tahun 2024 triwulan IV nilai DPK meningkat sebesar 3.77%, tetapi penyaluran kredit menurun sebesar 21.80%. Hal ini bertentangan dengan pendapat Dendawijaya (2015) yang menyatakan bahwa DPK adalah dana yang diperoleh dari masyarakat yang kelebihan dana dan disalurkan kembali berupa kredit untuk masyarakat yang kekurangan dana. Apabila DPK yang dihimpun oleh bank meningkat, maka kemampuan menyalurkan kredit kepada masyarakat juga meningkat. Pendapat tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Almayanti (2020), Rhada (2023), dan Gunawan (2024) menemukan bahwa DPK berpengaruh signifikan terhadap jumlah kredit. Namun penelitian yang dilakukan oleh Melinda (2021)

menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit.

Jika melihat perkembangan NPL pada 8 BPR di Kabupaten Buleleng dari tahun 2022-2024 rata-rata mengalami peningkatan, seperti pada BPR Nur Abadi nilai NPL meningkat sebesar 40.54% pada tahun 2024 triwulan II, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 8.92%. Pada BPR Bank Buleleng 45 (perseroda) nilai NPL tahun 2023 triwulan II meningkat sebesar 59.70%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 0.53%. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2024 triwulan I nilai NPL meningkat sebesar 67.01%, akan tetapi penyaluran kredit juga ikut meningkat sebesar 1.92%. Pada BPR Indra Candra nilai NPL tahun 2022 triwulan II meningkat sebesar 5.19%, namun penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 0.40%. Di tahun yang sama pada triwulan IV nilai NPL meningkat sebesar 1.42%, akan tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 5.87%. Di tahun 2024 triwulan II nilai NPL meningkat sebesar 9.74, namun penyaluran kredit juga meningkat sebesar 0.46%. BPR Nusamba Kubutambahan nilai NPL meningkat sebesar 2.70% pada tahun 2022 triwulan II, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 1.67%. pada tahun 2023 triwulan I NPL meningkat sebesar 49.48%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 7.45%. Di tahun yang sama triwulan III nilai NPL meningkat sebesar 4.17%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 4.06%. Pada BPR Adi Jaya Mulia nilai NPL di tahun 2023 triwulan II mengalami peningkatan sebesar 17.65%, akan tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 5.20%. Pada triwulan III nilai NPL meningkat sebesar 23.24, tetapi penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 0.33%. Pada BPR Cahaya Bina Putra di tahun 2023 triwulan I NPL mengalami

peningkatan sebesar 9.84%, tetapi penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 8.09%. Selanjutnya di tahun 2024 triwulan I nilai NPL mengalami peningkatan sebesar 6.49%, akan tetapi penyaluran kredit juga mengalami peningkatan sebesar 1.06%. Pada BPR Suryajaya Kubutambahan di tahun 2022 triwulan IV nilai NPL meningkat sebesar 18.95%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 15.91%. Selanjutnya di tahun 2023 triwulan IV nilai NPL meningkat sebesar 58.80%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 0.08%. Di tahun 2024 triwulan I nilai NPL meningkat sebesar 17.28%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 3.70%. Pada triwulan III nilai NPL meningkat sebesar 12.33%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 1.02%. Pada BPR Kanaya di tahun 2024 triwulan I nilai NPL meningkat sebesar 314.06, akan tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 25.93%. Selanjutnya pada triwulan II nilai NPL meningkat sebesar 26.62%, tetapi penyaluran kredit juga meningkat sebesar 28.96%. Pergerakan NPL yang berlawanan dengan pergerakan total kredit yang disalurkan tentunya tidak sesuai dengan pendapat Ali (2004: 321) yang menyatakan bahwa NPL menunjukkan risiko kredit, semakin tinggi tingkat NPL, maka semakin besar pula risiko kredit yang ditanggung oleh pihak bank. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Qulby (2023), yang menemukan bahwa NPL berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran kredit. Namun, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Puspasari. (2020) yang menemukan bahwa NPL berpengaruh positif signifikan terhadap jumlah penyaluran kredit.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penelitian di atas dan hasil penelitian terdahulu yang terdapat gap atau perbedaan, maka penulis mengangkat judul penelitian adalah **“Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan *Non Performing Loan* (NPL)**

Terhadap Penyaluran Kredit Pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024”.

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang terjadi pada BPR di Kabupaten Buleleng yaitu sebagai berikut.

1. Terjadinya fluktuasi penyaluran kredit pasca *Covid-19* pada BPR di Kabupaten Buleleng.
2. Terjadinya kenaikan pada dana pihak ketiga terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng.
3. Terjadinya peningkatan pada *Non Performing Loan* terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng.
4. Adanya kesenjangan teori yang di kemukakan oleh peneliti sebelumnya mengenai pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing Loan* terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan untuk menghindari perluasan pembahasan dalam penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada bank perkreditan rakyat di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mempersempit cakupan penelitian agar penelitian ini lebih tepat sasaran serta terperinci dan memudahkan dalam pengumpulan data, penulis berpendapat bahwa variabel-variabel penelitian hanya pada tiga variabel

yang terdiri dari variabel *independent* dan variabel *dependen*. Penelitian ini difokuskan untuk menganalisis pengaruh dana pihak ketiga dan *non performing loan* sebagai variabel *independent* terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng sebagai variabel *dependen*. Dengan pembatasan masalah ini, diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan temuan yang lebih akurat dan bermanfaat.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

1. Apakah dana pihak ketiga dan *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024?
2. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024?
3. Apakah *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Menguji pengaruh dana pihak ketiga dan *Non Performing Loan* berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024.
2. Menguji pengaruh dana pihak ketiga berpengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024.

3. Menguji pengaruh *Non Performing Loan* perbengaruh terhadap penyaluran kredit pada BPR di Kabupaten Buleleng Periode 2022-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, adapun manfaat yang diharapkan yaitu.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini yaitu diharapkan dapat menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan dalam bidang manajemen khususnya manajemen keuangan khususnya tentang pengaruh DPK dan NPL terhadap penyaluran kredit pada BPR khususnya di Kabupaten Buleleng, dan juga diharapkan penelitian ini mampu memberikan bahan kajian bagi peneliti yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan tambahan informasi pada pihak yang memiliki kepentingan terutama pada sektor perbankan. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh DPK dan NPL terhadap Penyaluran Kredit pada BPR, diharapkan kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran dan mendukung pertumbuhan ekonomi serta pemberdayaan masyarakat melalui akses permodalan yang lebih baik khususnya dalam hal penyaluran kredit.